

**Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
pada PT Len Industri (Persero)**

Annisa Asisiura

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2014

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana PT Len Industri (Persero) menerapkan prinsip-prinsip GCG, mengetahui hubungan dari penerapan prinsip-prinsip dengan kinerja keuangan menurut sudut pandang perusahaan, serta hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pengimplementasian GCG. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data penelitian yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG yang terdiri atas keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran dengan cukup baik. Perusahaan merasa bahwa GCG akan turut memengaruhi peningkatan kinerja keuangan walaupun tidak dapat dirasakan secara instan melainkan membutuhkan proses dan waktu. Disamping itu, perusahaan masih perlu merealisasikan *draft Whistle Blowing System* (WBS) dan peraturan gratifikasi. Peraturan perusahaan mengenai *reward* dan *punishment* juga harus lebih diperjelas agar memotivasi para karyawan dalam bekerja sehingga kinerja perusahaan secara keseluruhan dapat lebih baik dari waktu ke waktu.

Kata kunci: *Good Corporate Governance*, keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kewajaran.

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles

Analysis at PT Len Industri (Persero)

Annisa Asisiura

Faculty of Economic and Bussiness, Brawijaya University, 2014

ABSTRACT

This research is conducted to have better understanding on how far PT Len Industri (Persero) does the implementation of GCG principles in relation to government's rules, how it correlates to its financial performance from company's view, and learn about things that the company should repair and do better in the year ahead. This research is a qualitative research with case study approach. Datas are collected through interview and documentation. The results of this research shows that said company has implemented the GCG Principles: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness at PT Len Industri (Persero) are considered good enough. Len Industri thought that GCG will result in increase of financial performance, although it's not instant and it needs process and time. Besides, Len Industri still needs to realize the *draft Whistle Blowing System* (WBS) and gratification regulation to further improve the company. The rules about reward and punishment also need to be more clear for all the employees so they would be motivated and do their job with their best performance, so the company could consistently improve in passing time.

Keywords : Good Corporate Governance, transparancy, accountability, responsibility, independence, fairness.

LATAR BELAKANG

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu struktur yang diterapkan agar perusahaan dapat semakin berkembang dan terus meningkatkan kinerja dengan didasari oleh perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Sebagaimana disampaikan Sutedi (2011) dalam bukunya *Good Corporate Governance* (GCG), dijelaskan bahwa definisi *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Cadbury adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Berkaitan dengan nilai-nilai etika yang mendasari kegiatan bisnis sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat lima prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menurut kementerian BUMN yaitu TARIF: *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian) dan *fairness* (kewajaran).

Indonesia telah membentuk suatu komite pada tahun 1999 yang bertugas untuk merekomendasikan pedoman umum *Good Corporate Governance* (GCG) yang pertama yaitu Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Berdasarkan KEP/49/M.EKON/11/2004 kemudian KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan menghasilkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2006 yang menjadi dasar bagi perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang diubah menjadi PER-01/MBU/2011 dan kemudian disempurnakan lewat PER-09/MBU/2012.

Adanya hal-hal terkait kebijakan pemerintah memberikan gambaran mengenai kebutuhan akan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia yang semakin menjadi topik menarik untuk dibahas. Pemerintah menginginkan keseragaman pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) namun dalam praktik nyata masih terdapat tingkatan atau perbedaan kepatuhan perusahaan-perusahaan terhadap peraturan yang ada.

Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan PT Len Industri (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan BUMN pada industri elektronika dan prasarana dan sebagai perusahaan yang membentuk Tim GCG pada Tahun 2010 sehingga isu GCG dalam perusahaan masih hangat. Penelitian ini ingin mengetahui sejauh apa kemudian perusahaan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), bagaimana hubungannya terhadap kinerja keuangan menurut sudut pandang perusahaan, dan hal apa saja yang perlu ditingkatkan.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara *principal* dan *agen* (dikembangkan oleh Jensen and Meckling). Dalam hubungan ini juga didapat bahwa manajer akan memiliki lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan dengan pemilik, ketidakseimbangan informasi yang dimiliki ini seringkali disebut juga asimetri informasi. Dalam kegiatan operasional perusahaan, asimetri informasi harus ditekan agar kemungkinannya timbul menjadi seminimal mungkin. Dan untuk meminimalisasinya diperlukan pengawasan atau *monitoring*.

Good Corporate Governance (GCG)

Definisi atas *Good Corporate Governance* (GCG) sendiri telah mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun seiring dengan kemajuan jaman dan perekonomian dimana *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi suatu hal yang semakin penting, pengertian dalam *Cadbury Committee* (1992) ialah:

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities.”

Good Corporate Governance (GCG) dibutuhkan dalam rangka meminimalisir kesalahan antar hubungan yang terjalin dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Tujuan dan manfaat penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara garis besar untuk menjaga *going concern* perusahaan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan, serta memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Prinsip-prinsip utama dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang menjadi indikator, sebagaimana yang telah dirancang oleh *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG, 2009: 12-13) dan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2004: 49-58) yaitu:

a. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku insider.

b. *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/Tranparansi)

Prinsip pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami pemangku kepentingan.

c. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi serta pengendalian terhadap manajemen.

d. *Responsibility* (Responsibilitas)

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi professional, dan menjunjung etika serta memelihara bisnis yang sehat.

e. *Independency* (Independen)

Adanya masing-masing organ perusahaan yang tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain merupakan salah satu bentuk independensi dalam suatu perusahaan.

Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG)

Pedoman mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan sebagai dasar dalam pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip bagi perusahaan di Indonesia, menggunakan Pedoman 2006 yang diubah kedalam PER-01/MBU/2011 dan disempurnakan dalam PER-09/MBU/2012 pada Juli 2012.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN

Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia dikenal pada tahun 1997 saat krisis ekonomi menerpa, banyak perusahaan yang kemudian tidak mampu bertahan. Menyadari situasi ini, *Good Corporate Governance* (GCG) yang buruk disinyalir menjadi salah satu alasan, maka pemerintah melalui Kementrian BUMN mulai memperkenalkan *Good Corporate Governance* (GCG) agar dapat menjadi landasan operasional perusahaan. Pemerintah mendorong perusahaan di Indonesia untuk menerapkannya dengan membuat peraturan-peraturan yang terkait.

Analisis Kinerja Keuangan

Laporan keuangan bertugas menginformasikan keadaan keuangan perusahaan guna menentukan langkah-langkah serta kebijakan yang akan diambil perusahaan dan juga para pemilik kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Berdasarkan pengertian sebelumnya, maka kegunaan yang utama laporan keuangan ialah sebagai alat evaluasi kinerja perusahaan.

Rasio Keuangan

Rasio keuangan dapat membandingkan kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan juga memproyeksikan gambaran kinerja tahun berikutnya. Pengelompokkan rasio keuangan tersebut ialah:

1. Rasio Profitabilitas

Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas mencakup *return on assets*, *return on equity*, *gross profit margin*, *operating ratio*, dan *net profit margin*.

2. Rasio Likuiditas

Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang rata-rata berada dalam kurun waktu satu tahun. Rasio likuiditas mencakup *current ratio*, *quick ratio*, dan *net working capital*.

3. Rasio Solvabilitas

Menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya yang memiliki batas waktu lebih dari satu tahun. Dari rasio ini pun dapat dilihat seberapa besar perusahaan membiayai asetnya dengan menggunakan hutang usaha. Rasio solvabilitas mencakup *debt ratio*, *debt to equity ratio*, *long term debt ratio*, *times interest earned*, *cash flow to net income* dan *return on sales*.

4. Rasio Aktivitas

Menggambarkan kemampuan perusahaan mendayagunakan aset-aset perusahaan yang dimiliki mencakup *total assets turnover*, *fixed assets turnover*, *account receivable turnover*, *inventory turnover*, *average collection period*, dan *day's sales inventory*.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif yang didefinisikan Moleong (2011:

“Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”

Berdasarkan hal tersebut peneliti memilih menggunakan studi kasus sebagai cara peneliti dalam mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai subjek penelitian dalam hal ini prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini ialah aktivitas manajerial serta data laporan keuangan PT Len Industri (Persero) tahun 2010 hingga tahun 2012.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu kantor PT Len Industri (Persero) yang berada di Jalan Soekarno Hatta 442, Bandung, 40252, Indonesia.

Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah data primer yang merupakan sumber asli atau tidak melalui media perantara.

PEMBAHASAN

Perhatian atas pentingnya *Good Corporate Governance* yang kemudian ditunjukkan pemerintah dengan mengeluarkan sebuah Pedoman GCG 2006 lewat badan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) mendapat sambutan baik dari perusahaan mengenai awal penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan sistem penerapannya. Dasar penerapan kebijakan penilaian *Good Corporate Governance* yang berselang-seling adalah atas dasar pemerintah.

Transparansi

Mengenai sejauh mana prinsip pertama yaitu prinsip transparansi diimplementasikan di perusahaan berkaitan dengan keterbukaan akan informasi bagi pihak-pihak yang terkait, dijelaskan:

“Ada bagian yang mengatur web baik web eksternal maupun internal yang mencakup segala informasi yang dibutuhkan dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai perusahaan dan diupdate setiap ada informasi baru yang perlu disampaikan. Kondisi perusahaan dan tentunya laporan keuangan dapat langsung didownload via web. Begitu pula sasaran dan strategi perusahaan sudah tertera disana.”

Transparansi sistem penggajian, tunjangan, dan juga promosi sebisa mungkin diperlihatkan secara rinci dan terbuka disebutkan bahwa segala penjelasan dapat diketahui karyawan dan tertera pula pada perjanjian kerja antara Len dan serikat kerja. Berkaitan dengan rekrutmen pegawai, perusahaan belum memiliki peraturan yang jelas mengenai calon karyawan yang memiliki keterbatasan fisik, sedangkan dalam PER-01/MBU/2011 BAB VIII mengenai Keselamatan dan Kesempatan Kerja serta Kelestarian Lingkungan Bagian Kedua Pasal 37 (1).

4.2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas yang baik dalam suatu perusahaan harus dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas ada kekurangan dibagian perulunya menambah *Whistle Blowing Systems* (WBS) dalam perusahaan:

“Bila ada temuan, itu salah satu kekurangan GCG perusahaan, Len masih belum mempunyai Whistle Blowing Systems (WBS), saat ini baru ada draftnya jadi belum dilaksanakan. WBS itu kalau misal ada stakeholders, menemukan sesuatu yang kurang sesuai dengan sebagaimana mestinya maka bisa langsung melapor. Rencananya kita lakukan implementasinya tahun 2014.”

Pengertian umum *Whistle Blowing Systems* (WBS) ialah sistem yang memfasilitasi *whistle blower* atau seseorang yang melaporkan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum terutama kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalam organisasi atau institusi tempat dia bekerja. Peran *whistle blower* sangat penting dan akan sangat membantu dalam pengungkapan suatu kasus kecurangan yang terjadi dalam institusinya.

Di Indonesia sendiri belum keseluruhan perusahaan menerapkan kebijakan *Whistle Blowing Systems* (WBS) dikarenakan masih takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi setelah pelaporan. Peraturan yang mengatur hal ini sebenarnya sudah ada yaitu UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjabarkan bahwa lembaga tersebut akan melindungi saksi atau *whistle blower* tersebut. Terlebih lagi jaminan keamanan dan perlindungan hukum telah diatur dalam UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang akan memberi perlindungan bagi pelapor berupa jaminan fisik perlindungan.

Selain itu dari segi peningkatan keahlian karyawan telah ada program dari SDM, pengembangan, menawarkan kursus, *workshop*, seminar, atau sekolah misalnya atau karyawan pun dapat berinisiatif dan melakukan *searching* sendiri dan mengajukan ke perusahaan, bila disetujui maka bisa langsung dijalankan. Perusahaan sudah berusaha menampilkan pedoman yang dimiliki pada web yang dapat dengan mudah dilihat oleh karyawan, namun himbuan bagi para karyawan untuk membaca peraturan maupun pedoman perilaku serta pembagian tugas dan wewenang juga info-info yang dimiliki perusahaan kurang terkoordinir sehingga tidak menjamin seluruh karyawan telah mendapat dan memahami info-info yang ada berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan dan kegiatan operasional.

Namun perusahaan tidak memberikan data secara rinci mengenai kebijakan *reward* dan *punishment* tersebut sehingga penjabaran menjadi kurang jelas. Penghargaan dibutuhkan bagi karyawan berprestasi dan sanksi dibutuhkan bagi karyawan yang melanggar aturan yang berlaku di perusahaan dan sanksi bagi pelanggaran aturan perusahaan seharusnya lebih jelas agar tidak ada karyawan yang menganggap sebelah mata peraturan yang telah dibuat.

4.2.3 Kemandirian

Prinsip *Good Corporate Governance* yang ketiga yaitu prinsip kemandirian, penerapannya dalam perusahaan:

“Sampai sejauh ini tidak ada benturan atau tunggangan kepentingan atau kepentingan politik, memang kita itu perusahaan BUMN kan perusahaan yang diberikan tanggung jawab mengelola tapi juga diberikan peraturan-peraturan. Tapi tetap berjalan secara fair saja, bisnis is bisnis.”

Sekretaris perusahaan menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan tidak ditunggangi oleh kepentingan khusus apapun, namun kekurangan dari prinsip kemandirian yang belum diterapkan ialah mengenai kebijakan gratifikasi:

“Programnya itu salah satu temuan kemarin, kita baru sebatas draft. Tapi menuju ke arah sana untuk bebas gratifikasi tentu sudah coba diberlakukan sejak lama dijalankan.”

Black’s Law Dictionary menjelaskan pengertian gratifikasi atau gratification sebagai *“A voluntarily given reward or recompense for a service or benefit”* yang diartikan sebagai sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Di negara-negara maju, gratifikasi di kalangan birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan sangat dilarang karena akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik seperti yang dijelaskan pada Pasal 21 B UU No.20 Tahun 2001.

4.2.4 Tanggung Jawab

Prinsip keempat ialah pertanggungjawaban, aktivitas Len yang secara berkelanjutan dilngsungkan perihal kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar ditunjukkan dengan aktif dalam menggalakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*:

“Len sekarang tergabung dalam proyek Bpk Ridwan Kamil yang meminta izin kementriaan, Bpk Dahlan Iskan, untuk memberdayakan BUMN di Bandung, program “BUMN Bandung Juara”. Kurang lebih 11 perusahaan: Telkom, PT Pos, PT KA, dll. Tahun ini koordinatornya adalah Len yang mengkoordinir teman-teman BUMN. Sekarang masih menyiapkan rencana-rencana. CSR perusahaan diharapkan akan lebih terkoordinir dan seragam juga sejalan dengan program Pemda dan tidak terlalu sendiri-sendiri dalam menentukan kebijakan CSR. Mengenai kegiatan CSR yang terbaru kemarin Len dengan Bank Mandiri untuk kesejahteraan masyarakat Kereta Api.”

Selain itu tanggung jawab perusahaan juga berhubungan dengan Sistem Pengendalian Internal yang baik di perusahaan, penjelasan Bapak Syaifuddin:

“Tahun 2012 sudah cukup baik ya, tahun 2013 kita melakukan pembersihan lagi, pembersihan secara personal di beberapa divisi antara lain di SPI itu. Orang-orang yang dipekerjakan ialah karyawan baru yang tergolong fresh dalam bekerja, diantaranya para akuntan sebagai penanggung jawab SPI. Diperbesar dan diperkuat untuk meningkatkan performa perusahaan.”

4.2.5 Kewajaran

Prinsip yang kelima yaitu kewajaran, pihak perusahaan menjelaskan:

“Seperti bulan Desember ini semua sedang banting tulang untuk bekerja akhir tahun, laporan keuangan dan kondisi perusahaan serta masalah yang dihadapi masih dalam batas wajar dan dapat diselesaikan.”

Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan

Hubungan penerapan Good Corporate Governance dengan kinerja keuangan menurut pandangan perusahaan Hubungan antara *Good Corporate Governance* (GCG) dengan kinerja keuangan perusahaan dijelaskan oleh Sekretaris Perusahaan yang mengawasi perkembangan *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan::

“Tentu saja seiring dengan tata kelola perusahaan yang baik maka kinerja keuangan perusahaan pun menjadi semakin kinclong dan menambah kepercayaan publik atau pihak eksternal perusahaan juga. Di Len sendiri bisa dilihat saat pengupayaan perbaikan dan penerapan GCG mulai tahun 2007, begitu pula dengan hasil kinerja keuangan yang terus meningkat hingga 2012. Tahun 2007 itu kita masih berupa statement ingin menjadi 1 trillion-company namun sekarang syukur sudah lewat dari target tersebut, sekarang sudah di atas 2 sekarang ini.”

Pernyataan tersebut menjawab permasalahan dalam penelitian ini mengenai keterkaitan penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan dimana Bapak Syaifuddin pun menjelaskan bahwa kaitan yang paling nyata ialah akan berdampak pada hal kepercayaan.

No.	Rumus Rasio Keuangan				
	Rasio Profitabilitas		2010	2011	2012
1	ROE	$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$	15,75%	20,90%	25,96%
2	ROI	$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$	3,03%	4,60%	4,67%
Rasio Likuiditas					
1	<i>Cash Ratio</i>	$\frac{\text{Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$	18,40%	14,95%	27,34%
2	<i>Current Ratio</i>	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$	114,50%	121,31%	126,88%
Rasio Aktivitas					
1	<i>Collection Periods</i>	$\frac{\text{Penjualan}}{\text{Piutang Usaha}}$	2,12	33,07	32,05
2	Perputaran Persediaan	$\frac{\text{HPP}}{\text{Persediaan}}$	27	19	32
Rasio Solvabilitas					
1	Perputaran Total Aset	$\frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$	105%	148,68%	161%
2	Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	$\frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Aset}}$	19,20%	22,03%	18%

Metode penilaian tingkat kesehatan perusahaan mengacu pada Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-1100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2012 berada pada golongan Sehat: AA dengan skor 87. Meningkat sebanyak 4,19% dibandingkan tahun 2011 sebesar 83,50%.

Hal yang Perlu Ditingkatkan Terkait Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Rencana penyempurnaan yang dirasakan perlu segera diimplementasikan yaitu perusahaan akan mencanangkan dua buah sistem baru yang hingga saat ini belum dapat diterapkan karena proses perencanaan sistem yang membutuhkan waktu serta perlunya proses dari mulai sosialisasi hingga penerapan dan pengawasan suatu kebijakan baru. Perusahaan bertekad untuk membenahi satu demi satu peraturan yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

Dijabarkan oleh Bpk Syaifuddin selaku Sekretaris Umum:

“Hal lain menyangkut kelima prinsip sejauh ini sudah cukup sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan disesuaikan pula dengan aturan yang berlaku, di tahun depan kita akan fokus menggalakkan dua hal yang tahun ini belum terlaksana yaitu Whistle Blowing System (WBS) dan gratifikasi. Kebijakan lain hanya tinggal perlu untuk di-upgrade sedikit agar lebih maksimal saja, on improvement. Hal-hal yang terus diperbaiki seperti sekretaris perusahaan, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit semua memang sudah ada namun hanya tinggal ditingkatkan saja kinerja supaya lebih baik lagi dari tahun ke tahun.”

Pernyataan sekretaris umum mengarahkan pada kesimpulan bahwa perusahaan masih terus dalam upaya membenahan diri agar dapat tercipta pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang maksimal. Karena sudah mulai membiasakan diri sejak lama, sehingga untuk hal-hal dasar sebagaimana diatur dalam pedoman *Good Corporate Governance* tahun 2006 yang diubah di tahun 2011 dan disempurnakan kembali pada tahun 2012 sudah mendekati sesuai. Hanya dalam beberapa sistem yang sedang diarahkan menjadi lebih baik lagi. Begitu pula dengan pembagian tugas serta tanggung jawab dan juga mengenai rotasi karyawan secara berkala agar independensi dari tiap bagian terus terjaga.

Bapak Donny menambahkan kembali:

“Esensinya ini kan GCG adalah usaha semua pihak agar dapat menjadi lebih baik, memang kalau dilihat sepintas BUMN itu ditugaskan untuk terus usaha, terus cari duit, di sisi lain kita juga diikat dengan berbagai aturan. Ada yang berpendapat prosedur jadi lebih menyulitkan. Secara keseluruhan ada hal-hal yang masih kurang seperti peraturan-peraturan WBS dan gratifikasi yang disebutkan sebelumnya namun masih dirasakan dalam tahap wajar jadi tidak mengganggu kinerja perusahaan. Lebih fokus penerapan GCG agar perusahaan lebih baik lagi.”

Bapak Donny selaku sekretaris perusahaan yang juga membawahi tim yang ditugaskan untuk mengurus perihal rancangan dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di PT Len Industri (Persero) meninjau bahwa perkembangan perusahaan baik dari segi kinerja keuangan maupun operasional dan bagian lain secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan pula dengan peran pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, berpengaruh meskipun tidak dapat secara langsung signifikan sesaat setelah adanya pengaturan dalam perusahaan melainkan implementasinya bertahap dan untuk tahun-tahun berikutnya perusahaan dirasa perlu segera menerapkan *Whistle Blowing System* (WBS) untuk menjaga perusahaan dari oknum atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Selain *Whistle Blowing System* (WBS) perusahaan pun sangat memerlukan system gratifikasi dimana organ perusahaan tidak diperbolehkan menerima pemberian dari pihak luar demi kelangsungan suatu transaksi atau kegiatan ekonomi lain yang berhubungan dengan perusahaan.

Selain hal-hal besar yang disampaikan di atas dan memerlukan tindakan segera baik pengimplementasian dan pengawasannya dalam perusahaan, beberapa

kebijakan perusahaan yang masih terkendala untuk dilaksanakan dan perlu diperbaiki lagi agar perusahaan dapat menjadi lebih baik ialah:

- a. Menekankan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku terutama perubahan peraturan yang ada bagi karyawan agar karyawan dapat lebih memahami dan bertindak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh perusahaan demi kebaikan bersama.
- b. Perusahaan masih perlu menegaskan kembali mengenai ketentuan *reward* dan *punishment* karyawan. Selama ini ketentuan tersebut ialah tertulis pada web namun belum secara terpusat ada perintah untuk mempelajari lebih lanjut. Baik sistem penghargaan maupun sanksi adalah hal penting bagi kedisiplinan perusahaan yang perlu diperhatikan secara lebih mendalam lagi.

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Len Industri (Persero)

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Len Industri (Persero):

1. Prinsip transparansi diterapkan dengan cukup baik namun beberapa hal masih perlu diperbaiki seperti kejelasan peraturan terkait penerimaan karyawan berketerbatasan fisik serta himbauan agar karyawan memiliki keinginan untuk mempelajari peraturan harus ditingkatkan.

2. Prinsip akuntabilitas diterapkan dengan cukup baik namun perusahaan masih dalam tahap penyempurnaan dikarenakan kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS) yang masih berupa *draft* atau rancangan acara. Sosialisasi mengenai pedoman perilaku perusahaan harus ditingkatkan agar keseluruhan organ perusahaan mengetahui dan memahami hal tersebut. *Reward* dan *punishment* harus lebih dipertegas. Kejelasan mengenai hal-hal tersebut penting, penghargaan akan memotivasi karyawan agar dapat memaksimalkan diri dalam pekerjaan. Sanksi yang tegas dibutuhkan supaya membawa dampak baik dengan terhindarnya perusahaan dari tindakan negatif yang merugikan.
3. Prinsip kemandirian diterapkan dengan cukup baik namun perusahaan belum menerapkan sistem atau peraturan mengenai gratifikasi. Hal seperti ini sebaiknya segera direalisasikan karena dapat meningkatkan kepercayaan pihak eksternal dan independensi perusahaan semakin tinggi.
4. Prinsip tanggung jawab diterapkan dengan baik lewat aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Len ditunjuk menjadi koordinator *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Bandung dalam menyukseskan program kerja milik Bapak Ridwan Kamil.
5. Prinsip kewajaran diterapkan dengan baik dengan penyajian laporan keuangan perusahaan yang diaudit setiap tahun dan dinyatakan wajar. Perusahaan menyampaikan setiap masalah yang ada segera dicarikan jalan keluarnya.

5.1.2 Hubungan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan menurut pandangan perusahaan

Menjawab rumusan masalah kedua mengenai keterkaitan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan dilihat dari rasio keuangan yang menunjukkan tren positif dari tahun 2010 hingga 2012 yang menjadi salah satu landasan dari pernyataan opini informan perusahaan, dapat disimpulkan perusahaan merasa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) turut memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dampak penerapan prinsip pada hasil kinerja keuangan yang didapat baru dapat dirasakan ketika keduanya saling berjalan beriringan dari waktu ke waktu.

5.1.3 Hal yang perlu ditingkatkan perusahaan terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Hal yang perlu segera direalisasikan mengenai *Whistle Blowing System* (WBS) dan sistem gratifikasi dalam perusahaan. Hal lain yang perlu diperhatikan seperti kejelasan peraturan mengenai penerimaan karyawan berketerbatasan fisik serta himbauan agar karyawan memelajari peraturan dan pedoman perilaku perusahaan perlu untuk lebih ditegakkan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak dapat dilakukan secara terpisah tergantung dari keinginan masing-masing perusahaan. Seluruh perusahaan khususnya BUMN di Indonesia harus bersinergi dan perlu adanya integrasi dari tiap komponen bisnis agar dapat mencapai suatu perusahaan yang bersih dan berwibawa yang disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jawaban informan bersifat luas atau umum, sehingga ada jawaban yang kurang mendetail mengenai hal-hal yang ditanyakan.
2. Terdapat dokumen yang tidak dapat diberikan seperti beberapa peraturan tertulis, hasil *self-assesment* perusahaan, dan data Tim GCG perusahaan.
3. Penelitian kualitatif ini bersifat subjektif, analisis atas hasil data yang didapat dilihat dari sudut pandang penulis dan teori yang mendukung.

5.3 Saran

Beberapa saran yang ingin disampaikan kepada manajemen dan pihak yang bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau sejenis, yaitu:

5.3.1 Saran bagi Pihak Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam mengambil kebijakan mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) agar kondisi perusahaan menjadi lebih baik dan terus meningkat.

5.3.2 Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis selanjutnya dapat melakukan wawancara dengan lebih terperinci sehingga seluruh data yang diperlukan benar-benar diperoleh dan bahkan bila memungkinkan dapat menggunakan tambahan data melalui kuisisioner terkait pokok pembahasan penelitian agar jawaban yang diutarakan informan lebih lengkap dan meyakinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jensen, M.C dan Meckling, W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol3 (4). October 1976: 305-360.
- Jogiyanto, H. M. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman. Yogyakarta: BPFE.
- Kaihatu, T. S. 2006. GCG dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan KWU*. Vol. 8 (1). Maret 2006:1-9.
- Kementerian BUMN. 2002. Kepmen No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Kesehatan BUMN. Jakarta: Kementerian BUMN.
- Kementerian BUMN. 2002. SK Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN. Jakarta: Kementerian BUMN.
- Kementerian BUMN. 2003. Undang-Undang N0.19 Tahun 2003. Jakarta: Kementerian BUMN.
- Kementerian BUMN. 2011. Peraturan Menteri negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Jakarta: Kementerian BUMN. Agustus 2011.
- Kementerian BUMN. 2012. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Jakarta: Kementerian BUMN. Juni 2012.
- Kementerian BUMN. 2012. Peraturan Menteri negara BUMN No: Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Jakarta: Kementerian BUMN. Juli 2012.
- Kieso, Donald E.; Weygandt, Jerry J.; and Warfield, Terry D. 2010. *Intermediate Accounting*, Vol. 1: IFRS Edition. Wiley: United States.

- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance. Jakarta: KNKG.
- Kusumaningtyas, A. 2012. Penerapan GCG untuk Meningkatkan Kinerja BUMN. *Skripsi*.
- Moleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- PT Len Industri. 2010. Annual Report PT Len Industri (Persero) Tahun 2010. Bandung: PT Len Industri (Persero). Desember 2010.
- PT Len Industri. 2011. Annual Report PT Len Industri (Persero) Tahun 2011. Bandung: PT Len Industri (Persero). Desember 2011.
- PT Len Industri. 2012. Annual Report PT Len Industri (Persero) Tahun 2012. Bandung: PT Len Industri (Persero). Desember 2012.
- Rachman, A. A. 2012. Analisis Efektivitas Penerapan GCG dan Kinerja Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu: Studi Kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Batu. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rachmandy, G. 2012. Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rakhmat, A. 2013. Good Corporate Governance (GCG) sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social responsibility (CSR): Studi Kasus pada Community Development Center PT Telkom Malang. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rizky, A. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 9Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ruwaida, F. 2011. Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Tingkat Kesehatan Keuangan pada PD Bank Klaten. *Skripsi*.
- Septiana, E., Hadjaat, M., dan Yudaruddin, R. Analisis Rasio Likuiditas, Profitabilitas dan Aktivitas pada PT Kersa Gunung Wasada Samarinda. *Jurnal*. Universitas Mulawarman.

Sutedi, A. 2011. *Good corporate governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yasin, M. 2013. *Bussiness Executive Gathering 2013*.

Zarkasyi, M. W. 2008. *Good corporate governance pada badan usaha manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya*. Bandung: Alfabeta.

www.bappenas.go.id diakses 3 November 2013

www.bpkp.go.id diakses 3 November 2013

www.bumn.go.id diakses 3 November 2013

www.len.co.id. 2013. PT Len Industri (Persero)-Online.